

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Bandung salah satu kota metropolitan bahkan terbesar di Jawa Barat dan menjadi ibu kotanya. Kota Bandung sendiri dulunya dinamakan kota kembang karena dengan pemandangan alam yang indah ditambah suasana yang sejuk dengan di selimuti kabut. Seiring berjalannya waktu kota Bandung berubah menjadi kota *Paris Van Java* karena kebanyakan pusat-pusat pemberjaan seperti mall. Seiring berjalannya waktu, Kota Bandung merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berpenduduk paling padat di Jawa Barat sendiri. Penduduk yang tinggal di kota Bandung semakin meningkat tiap tahunnya. Penduduk di kota Bandung ini bukan hanya warga asli kota Bandung tetapi banyak juga yang berasal dari luar kota. Meningkatnya jumlah penduduk di kota Bandung, membuat penduduk yang tinggal di kota Bandung saling bersaing untuk meningkatkan keadaan ekonomi mereka dengan mencari peluang yang dapat menghasilkan materi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penduduk kota Bandung yang berusaha mencari peluang untuk mencari nafkah di kota Bandung berasal dari berbagai kalangan, dari orang-orang yang bergelar sampai orang-orang yang tidak bersekolah. Hal tersebut, menyebabkan meningkatnya pegawai kantoran hingga para wirausahawan, serta meningkatnya juga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi orang-orang yang

kurang beruntung dalam mencari kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan seseorang yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang usaha dan keberuntungannya lebih tinggi dari mereka untuk meningkatkan taraf kehidupannya dalam bidang ekonomi, mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi ataupun gaya hidup yang lebih mewah dari mereka, banyak yang memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat luas, misalnya dengan mengemis, mengamen ataupun mengelap tiap mobil yang berhenti pada lampu merah. Hal tersebut pun terkait dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota Bandung. Gelandangan merupakan seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan layak. Sedangkan mengemis dijadikan sebuah profesi oleh gelandangan.

Gelandangan dan Pengemis tersebut menyebar di berbagai penjuru kota Bandung. Demi memenuhi kebutuhan hidup, banyak dari mereka mencoba mencari peruntungan dengan meminta belas kasihan orang lain yang biasa disebut pengemis, bahkan tidak jarang dari pengemis tersebut sampai memaksa agar orang lain memberi rasa kasihan padanya. Gelandangan dan pengemis yang tidak memiliki tempat tinggal di Kota Bandung memilih untuk tinggal di sisi jalan kota Bandung yang beralaskan kardus-kardus bekas atau masyarakat menyebutnya Gelandangan. Gelandangan sendiri yaitu mereka yang tidak memiliki mata pencaharian tetap atau dapat memenuhi kebutuhan sandang

dan pangan mereka, dengan kata lain tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Gelandangan sendiri adalah hal yang terdiri dari keduanya yaitu orang yang berprofesi sebagai pengemis sekaligus menggelandang tersebut bukan hanya menyebar diseluruh kota Bandung saja, tetapi diseluruh kota di Indonesia. Mengurangi keberadaan gelandangan di kota Bandung menjadi tujuan bersama masyarakat Indonesia, Khususnya pemerintah kota Bandung.

Pemerintah kota Bandung pun ikut meretas gelandangan itu karena ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan dalam Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Dimana Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai fasilitator dalam meminimalkan gelandangan di kota Bandung untuk meminimalkan gelandangan dan pengemis di kota Bandung. Dengan jumlah PPKS di Kota Bandung yang meningkat selama Covid-19. Dinas Sosial Kota Bandung mencatat kenaikan PPKS sebesar 25 persen, Khususnya gelandangan. Dinas Sosial juga menjaring 227 orang PPKS dalam patrolinya meningkatnya, gelandangan berbanding lurus dengan naiknya angka kemiskinan Kota Bandung. Awal Maret 2021, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung mencatat ada sebanyak 3.000 warga kota Bandung yang dilaporkan jatuh miskin karena pandemi Covid-19. Gelandangan di kota Bandung menjadi masalah sosial yang sulit

diselesaikan di kota Bandung, dimana jumlahnya setiap hari terus meningkat dari hari ke hari.

Dinas Sosial Kota Bandung mengakui, pihaknya kekurangan sarana dan prasarana, SDM dan keterbatasan anggaran dalam upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung. Hal itulah yang membuat pihaknya sulit menghalau para PPKS yang seringkali muncul berupa gelandangan. Tidak memungkiri pada natal 2021 dan tahun baru 2021 kemarin angka gelandangan di Kota Bandung meroket. Sebab, lonjakan tersebut bukan hanya dari permasalahan kemiskinan saja, melainkan gelombang PHK dari perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Maka dari itu, pihaknya akan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Satpol PP dan kewilayahan di 30 kecamatan dalam penanganan gelandangan ini karena luasnya kota Bandung.

Dinsos mengakui menghadapi sejumlah kendala dalam menangani persoalan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Antara lain, dalam penerapan program atau implementasinya. Misalnya, ketika dinsos melakukan jangkauan atau yang sering disebut dengan razia, Dinsos membutuhkan strategi yang cukup untuk menangkap Gelandangan dan Pengemis yang berada di kota Bandung, karena ketika adanya jangkauan banyak gelandangan dan pengemis lari dan bersembunyi di titik yang berbeda-beda dikarenakan gelandangan dan pengemis tersebut mengetahui akan adanya jangkauan. Lalu tidak hanya itu, ketika gelandangan dan

pengemis tersebut ditemukan masih ditemukannya gelandangan dan Pengemis yang tidak memiliki NIK ataupun KTP.

Dalam mengatasi hal tersebut, dengan adanya masalah penarapan program, seperti gelandangan yang tidak diketahui identitas kependudukannya dan kurangnya anggota saat dilapangan, dan sulitnya untuk menghentikan aksi gelandangan dan pengemis dijalankan bentuk *collaborative governance* sangat diperlukan untuk mengatur permasalahan yang ada karena dengan diadakannya Kerjasama antar pemerintah dengan pihak swasta maupun masyarakat agar cepat terpecahkan masalah tersebut. Collaborative governance sebagai gambaran tentang cara menangani sesuatu isu atau persoalan tertentu yang sifatnya kabur dan tidak jelas yang memiliki implikasi bahwa ukuran-ukuran (standar-standar) dan relevan dari wilayah isu yang satu ke wilayah isu lainnya secara berbeda-beda. Siapa atau institusi mana saja yang dilibatkan atau harus dilibatkan dalam kolaborasi, dan bentuk dan proses kolaborasi dimungkinkan akan berbeda-beda dari sebuah wilayah isu tertentu ke isu lain dan dari satu sektor ke sektor lain. Ini untuk menggaris bawahi bahwa kolaborasi antara insitutsi pemerintahan dan insitutsi swasta dalam meminimalkan angka gelandangan di kota Bandung, tentu berbeda dengan institusi mana saja yang terlibat atau dilibatkan.

Maka dari itu perlu adanya *Collaborative Governance* antara Dinas Sosial kota Bandung sebagai fasilitator penanganan gelandangan dan pengemis di kota bandung, lalu SATPOL PP sebagai penertib gelandangan di kota Bandung, dan

DISDUKCAPIL kota Bandung sebagai pencatat gelandangan yang tidak memiliki identitas atau KTP di kota Bandung. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam laporan penelitian yang berjudul : : **“Collaborative Governance Untuk Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bandung”** .

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan latar belakang diatas, maka penelitian ini memfokuskan penelitian pada *Collaborative Governance* Untuk Meminimalkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandung. Fokus penelitian bersifat tentative sesuai dengan berlangsungnya penelitian.

Menurut **Ricardo S. Morse & John B (2012)** ada empat tahap proses collaborative governance dalam, antara lain:

1. *Assessment* (Penilaian)
2. *Initiation* (Permulaan)
3. *Deliberation* ( Pertimbangan)
4. *Implementation* (Penerapan)

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana *Collaborative Governance* dalam meminimalkan gelandangan dan pengemis di kota Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian *collaborative governance* untuk penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung ini adalah untuk menggambarkan bagaimana *Collaborative Governance* dalam penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bandung.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini ini diharapkan dapat memperluas wawasan, memperkaya ilmu pendidikan, sebagai bahan acuan dalam pengaplikasian mengenai kegiatan *Collaborative Governance* di Kota Bandung. Serta menjadi referensi dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya yang berkaitan mengenai ilmu administrasi publik mengenai *Collaborative Governance* untuk penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial kota Bandung.
2. Kegunaan Praktis, Diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi lebih serta sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap tingginya gelandangan dan pengemis di kota Bandung melalui *Collaborative Governance*.